

PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP SOFTWARE PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH DATAR BERDASARKAN SAP NO. 14 TENTANG ASET TIDAK BERWUJUD

Sri Adella Fitri^{1*}, Lefri Gusdi², Miftahul Fajriani³, M.Dian Saputra⁴, Putri Sundari⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Mahmud Yunus Batusangkar

¹sriadellafitri1234@gmail.com, ²lefrigusdilefri@gmail.com, ³miftafjrnn@gmail.com,
⁴dianfernadas@gmail.com, ⁵putrisundari121@gmail.com

Abstract, *The development of accounting in the Indonesian government can be said to be very slow to anticipate the demands of the times. The output produced by government accounting in Indonesia cannot be said to be accurate and not informative, so it cannot be used in decision making. Government Regulation No. 24 of 2005 describes Government Accounting Standards, hereinafter referred to as SAP, are accounting principles applied in preparing and presenting government financial reports. Based on this government regulation, the central and regional governments must apply full accrual-based accounting and no longer apply cash-based accounting. towards accruals. This research tends to determine the accounting treatment of software at the Office of Communication and Information Technology based on SAP No.14 regarding intangible assets. This research is quantitative research method with a descriptive approach with data collection techniques in the form of interviews, observation, and documentation. The results of the study show that the accounting treatment of software in the Office of Transportation Office which has 1 software, namely Simda BMD and Recognition and Measurement alone, there is no violence and termination of the software in this transportation service, there are also no disclosures related to the software.*

Keywords: *Accounting Treatment; Software; Government Accounting Standart; Intangible Assets*

Abstrak, Dalam melakukan analisis perlakuan akuntansi aset tetap, perlu dipahami definisi aset tetap dan standar akuntansi yang berlaku, serta melakukan pengakuan, pengukuran, pencatatan, serta pelaporan aset tetap secara benar dan konsisten. Artikel ini membahas tentang perlakuan akuntansi terhadap software pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar berdasarkan SAP no. 14 tentang Aset Tidak Berwujud. Dalam artikel ini akan dijelaskan mengenai definisi software sebagai aset tidak berwujud, pengakuan dan pengukuran software, serta pencatatan dan pelaporan software pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar. Artikel ini bertujuan guna memberi pengetahuan yang semakin jelas terkait perlakuan akuntansi terhadap software pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar dan memberikan informasi yang berguna untuk yang membaca, yakni yang mau tahu lebih mendalam terkait SAP No. 14 tentang Aset Tidak Berwujud. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai aset tetap, seperti inflasi, perubahan teknologi, dan perubahan regulasi, juga perlu diperhatikan dalam analisis perlakuan akuntansi aset tetap. Dengan melakukan analisis perlakuan akuntansi aset tetap yang benar dan konsisten, dinas-dinas pemerintahan dapat menjaga akuntabilitas publik dan efektivitas pelaporan keuangan.

Kata Kunci: *Perlakuan Akuntansi, Software, Standar akuntansi pemerintahan, Aset Tak Berwujud*

*Koresponden:

Artikel Ini Tersedia di <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/isafir/index>

PENDAHULUAN

Sebelum masa reformasi pengelolaan dana keuangan negara sistem pencatatan negara akuntansi sektor pemerintah memakai single entry, makin berkembangnya terus bergulir waktu ke waktu tahun 1998 membawakan berbagai transformasi. Tanpa disadari akuntansi pemerintahan mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, Akuntansi pemerintahan ini bisa disaksikan pada masa yang akan maju baru sampai masa pasca-reformasi kemerdekaan Indonesia, Dan terjadi kemunduran akuntansi pemerintahan Indonesia tak dapat melepaskan masa reformasi bidang keuangan negara Indonesia. Konservatif pada bidang keuangan negara Indonesia melekat pada beberapa perubahan yang dimana berubah menjadi pencatatan akuntansi dari single entry ke double entry. Dalam akuntansi terdapat perubahan dalam pencatatan nya menjadi basis penjelasan akrual atau bisa disebut dengan (basis akrual).

Akuntansi akrual menampung aset, kewajiban serta ekuitas dana yang diakui, dituliskan dalam transaksi. Keadaan lingkungan yang terpengaruh pada pencatatan sistem keuangan pemerintah yang tidak memperhatikan setara kas yang untuk dibayarkan. Pemerintah saat ini mencatat akuntansi menggunakan sistem ganda atau disebut (double entry system) sesuai PP No.24 tahun 2005. Pandangan Permendagri No.13 tahun 2006, melakukan sistem akuntansi yakni PPK SKPD level SKPD serta BUD di level SKPKD. Undang-undang Pemerintah No.24 tahun 2005 Standar Akuntansi Pemerintahan yang berisi tentang prinsip akuntansi digunakan untuk menata, memaparkan laporan keuangan pemerintah. Pada tiap substansi pelaporan pemerintah pusat pemerintah daerah harus menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan pada standar akuntansi pemerintahan membutuhkan kerangka penyusunan laporan pertanggungjawaban yang pelaksanaannya dilakukan oleh APBN/APBD berbentuk laporan keuangan yang terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Catatan atas laporan Keuangan, serta Laporan Arus Kas.

Akuntansi pemerintahan menggunakan perangkat akuntansi dalam bidang keuangan Negara yang disebut (public finance), secara khusus di tahapan saat melakukan penganggaran budget execution, yang mencakup pengaruh yang ditimbulkan, sifat permanen atau juga seluruh tingkat serta unit pemerintahan. Abdul Halim mengemukakan akuntansi pemerintahan yaitu program jasa yang mengadakan data kuantitatif khususnya sifatnya keuangan atas substansi pemerintah untuk menetapkan putusan ekonomi dari nalar berbagai pihak berkepentingan dari beragam alternatif sebuah kegiatan. Sumber keuangan Negara milik akuntabilitas pemerintahan dikelola serta bisa dipertanggungjawabkan menyesuaikan perintah serta amanat konstitusi. Penerapan fungsi di Indonesia sudah disusun pada UUD 1945 pasal 23 ayat (5). Akuntansi pemerintahan memungkinkan pemerintah guna menjalankan perancangan susunan APBN serta strategi pembangunan yang sebagaimana untuk program pembangunan untuk mengatur program tersebut dengan maksud adanya kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, efektivitas, serta ekonomis. Badan Pengawasan Pemeriksaan keuangan Indonesia mencakup pengecekan kepatuhan, pengecekan keuangan secara umum serta pengecekan operasional dan manajerial. Akuntansi pemerintahan yaitu suatu aktivitas yang memberikan jasa yang menyediakan informasi keuangan pemerintah berlandaskan pada proses pencatatan, pengelompokan, interpretasi informasi keuangan dan rekapitulasi sebuah transaksi keuangan. Menurut Revrison Baswir, akuntansi pemerintahan yakni akuntansi pemerintahan mencakup akuntansi bagi institusi non-profit, secara umum mencakup bidang akuntansi yang berhubungan antar institusi pemerintahan beserta sejumlah lembaga dengan maksud agar tak mencari laba. Badan pemerintah terus-menerus berukuran apakah besar kecilnya kejadian pada pencatatan sistem akuntansi ini, dan perusahaan digolongkan ke dalam lembaga mikro.

Dalam penelitian ini akan membahas mengenai aset tidak berwujud berdasarkan jenis sumber daya berupa software komputer yaitu Simda BMD yang terdapat di Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar. Dinas Perhubungan memegang atas pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan yang kedudukannya dipimpin Gubernur. Dinas Perhubungan memiliki tugas utama aturan guna melakukan urusan pemerintahan pada daerah dalam bidang perhubungan yang berdasarkan basis otonomi daerah. Penelitian di Dinas Perhubungan ini fokus pada software yang digunakan oleh dinas maupun

masyarakat yang mempermudah untuk melihat bagaimana perlakuan akuntansinya berdasarkan PSAK No 16 tentang Penerapan Aset Tak Berwujud pada Dinas Perhubungan nantinya. perlakuan akuntansi aset tetap pada dinas-dinas pemerintahan sangat penting untuk menjaga akuntabilitas publik dan efektivitas pelaporan keuangan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar memiliki berbagai macam aset tetap, termasuk aset tidak berwujud dalam bentuk software. Aset tak berbentuk ini memiliki nilai yang signifikan bagi dinas tersebut, namun seringkali sulit untuk diukur dan dikelola secara baik. Dengan begitu, tujuan riset ini yakni melakukan analisis pengelolaan aset tidak berwujud dalam bentuk software pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar. Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberi rekomendasi yang berguna bagi dinas tersebut dalam mengelola aset tidak berwujud mereka dengan lebih efektif.

TINJAUAN LITERATUR

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan di landasi oleh Undang-undang hukum yang penerapan akuntansi pemerintahan sebelum masa reformasi yaitu pada UU No. 5 Tahun 1974. Peraturan Pemerintah No. 5 dan 6 Tahun 1976 tentang Manual Admnsitrasi Keuangan Daerah atau yang sering disebut dengan (MAKUDA) pada Tahun 1981. Setelah masa reformasi, Indonesia menetapkan Undang- Undang No. 22 , dan No 25 Tahun 1999 yang mengatur pemerintahan daerah untuk perimbangan keuangan Pusat Daerah. Dan Indonesia menetapkan UU No. 17 Tahun 2003 Keuangan Negara serta UU No. 1 Tahun 2004 terkait Bendahara Negara. Dilihat melalui tonggak reformasi pada pengaturan keuangan negara mulai berjalan dengan baik dan bagus, yang akhirnya Pemerintahan memakai Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung jawab Keuangan negara No. 15 Tahun 2004.

Proses pencatatan Sistem akuntansi pemerintahan berubah yang dari single entry ke double entry di awal mula pencatatannya akuntansi pemerintahan masih memakai pencatatan akuntansi single entry. Sedangkan single entry punya sejumlah kekurangan dalam pencatatan akuntansi pemerintahan yang pada akhirnya berganti menjadi double entry. Pada pecatatan double entry, transaksi keuangan ditulis dua kali dan ditulis di sisi kolom debit di kiri serta sisi kolom kredit di kanan pada tabel yang digunakan. Dahulu pemerintah mencatat akuntansi pemerintahan menggunakan basis kas, Akuntansi berbasis kas ialah melegitimasi saat melakukan pencatatan transaksi terjadinya ketika menerima serta pengeluaran kas, tak mencatat aset serta kewajiban. Perbedaan saat pencatatan akuntansi berbasis kas yang mengarah akrual (cash basis toward accrual) memakai basis kas yang mengakui pendapatan, pembiayaan serta belanja Laporan Realisasi Anggaran yang berbasis akrual mengakui asset, kewajiban serta ekuitas pada neraca.

Jenis Aset Tak Berwujud

Pondasi akuntansi pada Laporan keuangan Pemerintahan menggunakan basis kas saat melegitimasi penerimaan belanja dalam pembelanjaan laporan realisasi anggaran berlandaskan akrual yang mengakui kewajiban, aset, ekuitas di neraca. Laporan Basis kas merealisasikan anggaran yang berpendapat bahwasanya pendapatan diakui ketika kas masuk ke rekening kas umum Negara dan daerah untuk entitas pelaporan, serta pada saat pemerintahan belanja diakui ketika keluarnya kas melalui rekening kas umum Negara atau daerah entitas pelaporan. Akuntansi pemerintahan yang mempunyai fungsi pada akrual berarti memiliki kewajiban, aset, dana serta ekuitas diakui serta dicatat saat adanya transaksi kejadian dimana keadaan lingkungan sangat punya pengaruh dalam keuangan pemerintah nantinya, tidak mengetahui kas dan setara kas masuk untuk melakukan pembayaran. Pemerintah pada era ini menggunakan pencatatan Sistem pencatatan sistem ganda yaitu,(double entry system) yang selaras PP No.24 tahun 2005. Berdasarkan Permendagri No.13 tahun 2006, yang melakukan pencatatan pada sistem akuntansi ini yakni PPK SKPD level SKPD serta BUD di level SKPKD.

Pengakuan

Berdasarkan taksiran pada SAP No. 7 pengklasifikasi aset tak berwujud adalah sebuah aset yang bisa diakui menjadi aset tetap jikalau berbentuk serta mencakup standar seperti :

1. Berupa barang yang periode manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan,
2. Dana akuisisi didapat dari aset diterima dan dilakukan pengukuran teruji,
3. Aset nya tak diperjual belikan ke bentuk aktivitas entitas normal,
4. Diterima dan membentuk tujuan untuk digunakan masa manfaat nya.

Saat mengakui aset dapat dilihat dari tanggungjawab jikalau ada bukti bahwasanya sudah menjadi penguncian hak kepemilikan atas kepemilikan secara hukum, contohnya mempunyai sertifikat tanah serta bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Aset tak berwujud yang dimiliki oleh pemerintah harus diukur dan dilaporkan ke bentuk neraca. Aset tetap dinilai melalui biaya perolehan diniali jikalau penilaian aset tetap memakai biaya perolehan yang memungkinkan tidak terletak pada nilai aset tak berwujud berdasarkan nilai wajar.

Aset Tak Berwujud sama hal nya Barang berwujud yang sesuai standar agar diakui pada aset atau aset tetap, awal yang wajib filaku kan yaitu dihitung atas dasar biaya perolehan. Jika aset tetap memperoleh tanpa nilai, biaya aset tersebut pada nilai wajar ketika aset tersebut yang Akan di peroleh. Kebutuhan disusunnya neraca awal sebuah entitas memiliki beberapa tahap seperti, biaya diperolehnya aset tetap yang dipakai yakni nilai wajar ketika neraca awal tersebut disusun. Periode yang berlanjut sesudah tanggal neraca awal yaitu memperoleh aset tetap baru untuk penggunaan entitas biaya perolehan untuk harga wajar bila biaya perolehan tak ditemukan. Beberapa Informasi dibawah ini dalam penyajian aset tak berwujud pada tahun 2011 :

- a. Kebijakan yang akuntansi peruntukkan bagi aset tetap
- b. Landasan penilaian akuntansi menggunakan pencatatan aset tetap
- c. Total rekonsiliasasi dicatat di awal serta akhir periode untuk memperlihatkan penambahan, penyimpanan, dan akumulasi penyusutan untuk mutasi aset tetap yang lain.
- d. Informasi penyusutan terdiri atas metode penyusutan, nilai penyusutan, tarif penyusutan, serta nilai manfaat.

Penyusutan yaitu mendistribusikan harga perolehan aset tetap yang akan jadi beban pada periode akuntansi yang nanti nya akan dinikmati masa manfaat dari aset tetap tersebut. Penyebab penyusutan disusutkan karena ulah manusia sendiri misalkan property perusahaan merek dagang kekayaan yang tidak pasti asal usulnya dari mana kecuali tanah, seluruh aktivasi akan dibatalkan. Berikut sejumlah aktiva tetap kerusakan serta arus pemicu penyusutan :

- a. Penyusutan bukan sebagai proses penilaian. Perusahaan tak melakukan pencatatan penyusutan atas dasar nilai pasar (jual) aktiva.
- b. Penyusutan menandakan perusahaan menyisihkan kas guna mengubah aktiva saat selesai periode pemakaiannya. Penyusutan tak ada yang dirugikan dengan kas.

Penyesuaian nilai aset tetap melakukan beragam teknik sistematis menyesuaikan periode manfaat. Teknik penyusutan yang dipakai bisa memberi gambaran manfaat ekonomis dan potensi jasa (service potential) yang hendak merebak ke pemerintah atas nilai penyusutan guna periode masing-masing.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini memakai analisis deskriptif yang dimana analisis penelitian ini menjelaskan situasi dan kondisi yang ada pada Dinas Perhubungan Tanah Datar kemudian, dipaparkan sehingga didapat data yang relevan serta akurat. Peneliti juga menganalisis data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung pada teknisi dinas perhubungan. Alat penelitian yang di gunakan seperti, pena, buku, handphone untuk merekam, dan media lainnya yang diperlukan oleh pewawancara untuk mengumpulkan data. Penelitian kualitatif ini menjadikan instrumen penelitian yang menemukan, memilih, menghimpun, melakukan olah data yang ditemui di lapangan, agar peneliti memperoleh data untuk memberi bukti absahnya data, sehingga dibutuhkan perlengkapan yang mendukung mencakup lembar dokumentasi, lembar wawancara,

lembar angka serta yang lainnya. Penelitian ini melakukan atas tiga (3) metode pengumpulan data mencakup observasi lapangan, wawancara, pengumpulan dokumen. Kajian data yang dipakai mencakup data reduksi (Reduction), Penyajian Data (Display Data), serta Conclusion Drawing. Data yang telah digabungkan melalui wawancara dan observasi dengan pihak Dinas Perhubungan Tanah Datar yang nantinya akan penulis lakukan reduksi data agar riset yang hendak dijalankan penulis cenderung fokus pada tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kantor Dinas Perhubungan atau sering disebut dengan Dishub Daerah Kabupaten Tanah Datar, provinsi Sumatra Barat. Dishub tanah datar ini memiliki tugas yang dimana untuk menyelenggarakan urusan kebijakan-kebijakan transportasi pada daerah Kabupaten tanah datar. Kebijakan dinas perhubungan sendiri menyangkut bebrapa diantaranya menyelenggarakan administrasi atau perizinan angkutan, mengevaluasi berdasarkan laporan yang terkait perhubungan tersebut. Dishub juga memiliki wewenang atas pemberian izin atas surat untuk transportasi dan perhubungan diantaranya surat izin Usaha Angkutan, izin Angkutan Penumpang Umum, izin Angkutan Barang, penerbitan izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Penumpang Umum, dan lain-lain nya

Berdasarkan hasil Wawancara dan pengumpulan data yang didapat peneliti melalui selaku Tenagan IT (*Information Technologi*) Buk Harismawati menjelaskan tentang Perlakuan Akuntansi terhadap Software pada Dinas Perhubungan Berdasarkan SAP No 14 tentang Aset Tidak Berwujud pada Dinas Perhubungan terkait Jumlah Software yang dimiliki Dinas Perhubungan dengan Buk Harismawati

“Jumlah Software yang dimiliki Dinas Perhubungan berjumlah 1 software”

Berdasarkan hasil wawancara yang berlangsung pada kantor dinas perhubungan Kabupaten Tanah Datar, bahwa software dinas perhubungan berjumlah 1 software. Yang untuk dipakai secara online maupun offline.

Terkait dengan nama software yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Tanah Datar bersama Buk Harismawati:

Nama Software yang dimiliki Dinas Perhubungan yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah atau disingkat dengan Simda BMD”

Berdasarkan hasil wawancara yang berlangsung pada kantor dinas perhubungan Kabupaten Tanah Datar, bahwa nama software yang dimiliki kantor dinas perhubungan tersebut bernama Simda BMD (Sistem Informasi Manajemen Daerah).

Adapun media penyimpanan terkait dengan software yang disimpan dalam penyimpanan stonger/online berdasarkan wawancara dengan Buk Harismawati:

“Informan Harismawati mengatakan, Software Dinas Perhubungan ini disimpan Only di Web tidak disimpan menggunakan alat seperti Flasdisk. Dan dikarekan hanya disimpan di dalam Web saja apabila ada orang yang ingin mengakses harus meminta izin terlebih dahulu ke dinas tersebut”

Berdasarkan hasil wawancara yang berlangsung pada kantor Dinas perhubungan Kabupaten Tanah Datar, bahwa software disimpan dalam penyimpanan Only di web.

Terkait dengan cara perolehan software yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Tanah Datar diketahui berdasarkan pertanyaan Buk Harismawati:

“Cara Perolehan software ini dikembangkan oleh Simda BMD Dinas Perhubungan tanah datar sendiri ,sehingga perolehannya tidak dapat sembarangan diakses oleh semabarangan orang yang tidak bertanggung jawab atau ingin menyalahgunakan aplikasi web tersebut”

Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya dinas perhubungan, bahwa software yang dimiliki Dinas tersebut tidak dikembangkan perolehannya, sehingga aplikasi pada dinas tersebut tidak bisa diakses oleh sembarangan orang dan hanya orang yang tertentu yang mengetahui web tersebut.

Terkait dengan harga perolehan dan nilai kontrak dari software yang dimiliki oleh dinas perhubungan yang diketahui berdasarkan tanya jawab dengan Buk Harismawati:

“Perolehan pada Dinas Perhubungan nilai biayanya atau nilai buku nya dalam waktu tahun 2022 pengadaannya biaya sekitar Rp9.593.605.706,39 yang kami peroleh dari wawancara Informan Harismawati”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan di kantor dinas perhubungan Kabupaten Tanah Datar, bahwa dalam setahun harga perolehan dinas perhubungan nilai biaya nya atau nilai bukunya dalam tahun 2022 sekitar Rp 9.593.605.706.

Terkait dengan kegunaan software yang dimiliki oleh Dinas perhubungan tanah datar diketahui berdasarkan wawancara sebelumnya dengan Buk Harismawati:

“Kegunaan dari Software Dinas Perhubungan yaitu Software Simda BMD ini meminit dan memajemen aset Pemerintahan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar yang nantinya akan membantu para pekerja pada dinas perhubungan”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada kantor dinas perhubungan Kabupaten Tanah Datar, bahwa kegunaan software dari Simda BMD ini meminit dan memajemen aset pemerintah dinas tersebut, yang dimana juga membantu para pekerja atau asisten yang berada di dinas perhubungan tersebut.

Terkai dengan software yang dimiliki secara penuh dan pengendalian perkembangan softwaree Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar berdasarkan wawancara dengan Buk Harismawati:

“Pengendalian pada Dinas Perhubungan dan software Dinas Perhubungan BPKB penuh milik Dinas Perhubungan dikarenakan pada Dinas Perhubungan hanya menggunakan Hak Pakai nya saja”

Berdasarkan hasil wawancara yang berlangsung pada kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar, bahwa software Dinas Perhubungan BPKB penuh milik Dinas Perhubungan dikarenakan dinas tersebut hanya menggunakan hak pakai nya saja.

Terkait dengan perolehan software Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar yang untuk dijual kembali atau diserahkan kepada masyarakat dapat diketahui wawancara dengan Buk Harismawati:

“Perolehan pada Dinas Perhubungan menggunakan izin pengguna Web tersebut, tanpa izin dari dinas perhubungan itu seorang atau siapapun tidak dapat mengakses nya”

Berdasarkan hasil wawancara yang berlangsung pada kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar, bahwa dinas perhubungan menggunakan izin penggunaan web tersebut atau siapapun tidak dapat mengakses tanpa izin dari orang dinas tersebut, dikarenakan maraknya pembobolan data yang sering terjadi disetiap tahunnya maka dinas tersebut hanya mengizinkan kepada orang yang mengetahui web dinas perhubungan saja selebihnya di kunci secara tertutup rapat.

Terkait dengan software Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar yang akan dipergunakan kurang dari satu tahun atau lebih dapat diketahui berdasarkan wawancara dengan Buk Harismawati:

“Perolehan datanya secara External, software Dinas Perhubungan tidak menggunakan Kontrak hanya saja dinas ini serta menggunakan Aplikasi MOYU. Perolehan Eksternal Dinas Perhubungan tidak memiliki nya, serta Perolehan data software di Dinas Perhubungan tidak menggunakan atau tidak diperjual belikan dimana pun orang yang ingin menggunakan software tersebut”

Berdasarkan hasil wawancara yang berlangsung pada kantor dinas perhubungan Kabupaten Tanah Datar, bahwa perolehan data yang didapat secara Exsternal pada dinas perhubungan tidak menggunakan kontrak, hanya menggunakan aplikasi MOYU. Serta software nya tidak diperjual belikan dimana pun orang yang ingin menggunakan aplikasi software tersebut.

Terkait dengan perolehan Exsternal pada bagian Integral pada software dinas perhubungan wawancara dengan Buk Harismawati:

“Pada pertanyaan ini tidak, dikarenakan pada dinas perhubungan software nya tidak di perjual belikan kemana pun, jikalau software nya sudah rusak akan dismpn digudang saja, sebagai contoh jika ada yang ingin tau bentuk apa software yang sudah lama tidak dipakai software untuk dijual kembali atau diserahkan kepada masyarakat”

Berdasarkan hasil wawancara yang berlangsung pada kantor dinas perhubungan Kabupaten Tanah Datar, software di dinas perhubungan ini tidak untuk diperjualbelikan

kemana pun. Dan jika sudah software mengalami kerusakan maka akan disimpan digudang sebagai contoh dari beberapa pemakaian software yang sudah terdahulu

Terkait dengan Perolehan software dijual kembali atau diserahkan kepada masyarakat atau tidaknya dengan wawancara dengan Buk Harismawati:

“Software pada Dinas Perhubungan ini digunakan setiap tahunnya, dan software tersebut diamortisasikan atau dipajang sebagai benda yang telah lama digunakan pada tahun sebelum-sebelumnya pada dinas perhubungan tanah datar dobok

Berdasarkan hasil wawancara yang berlangsung pada kantor dinas perhubungan Kabupaten Tanah Datar, bahwa software digunakan setiap tahunnya dan software diamortisasikan atau dipajang sebagai benda yang telah lama digunakan.

Terkait dengan software pada Dinas Perhubungan masa pemakaian software digunakan kurang dari 1 tahun atau lebih manfaat pada software wawancara dengan Buk Harismawati:

“Dinas Perhubungan ini menggunakan software pada masa manfaat 5 tahun penggunaan, Yang berarti masa pemanfaatan software ini lebih dari 1 tahun pemakaian”

Berdasarkan hasil wawancara yang berlangsung pada kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar, bahwa terkait dengan masa manfaat penggunaan software digunakan masa manfaat nya selama 5 tahun pemakaian.

Terkait dengan penggunaan metode apa yang digunakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar wawancara dengan Buk Harismawati:

“Software pada Dinas Perhubungan menggunakan metode Penyusutan, yang menghitung biaya aset atau aktiva tetap selama masa masih penggunaannya dan software ini tidak dihentikan penggunaannya. Dan Dinas Perhubungan ini Software ini juga diganti pada setiap tahunnya dan tidak dihentikan penggunaannya”

Berdasarkan hasil wawancara yang berlangsung pada kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar, bahwa metode yang digunakan di dinas perhubungan ini yaitu metode penyusutan, yang menghitung biaya aset dan aktiva tetap selama masih penggunaan dan ini tidak dihentikan penggunaannya.

Terkait dengan pemakaian berdasarkan ATB masa manfaat software pada Dinas Perhubungan secara terbatas atau tidaknya dengan wawancara Buk Harismawati:

“Pengungkapan ATB pada Dinas Perhubungan yang ATB nya memiliki masa manfaat tak terbatas yang memiliki kebijakan akuntansi nya itu masa manfaat nya selama 5 tahun, Jadi di dinas perhubungan ini mempunyai masa manfaat nya itu selama 5 tahun”

Berdasarkan hasil wawancara yang berlangsung pada kantor dinas perhubungan Kabupaten Tanah Datar, bahwa ATB dinas perhubungan memiliki masa manfaat tak terbatas yang memiliki kebijakan akuntansi nya itu masa manfaat 5 tahun.

Terkait dengan metode yang digunakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar menggunakan Metode Amortisasi wawancara dengan Buk Harismawati:

“Dinas Perhubungan ini menggunakan Metode amortisasi yang digunakan Dinas Perhubungan ATB tersebut terbatas masa manfaat nya, menggunakan metode Garis Lurus ucap”

Berdasarkan hasil wawancara yang berlangsung pada kantor dinas perhubungan Kabupaten Tanah Datar, bahwa dinas ini metode yang dipakai metode Garis lurus pada dinas perhubungan.

Terkait dengan nilai yang tercatat bruto dalam akumulasi amortisasi pada awal atau akhir dinas perhubungan menggunakan periode apa yang diwawancara dengan Buk Harismawati:

“Pada Dinas Perhubungan Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periodenya mempunyai nilai bruto dan akumulasi nya pada awal dan akhir periode nya dinas perhubungan tersebut”

Berdasarkan hasil wawancara yang berlangsung pada kantor dinas perhubungan Kabupaten Tanah Datar, bahwa nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periodenya dinas tersebut.

Terkait dengan pemakaian ATB pada Dinas Perhubungan apakah dinas tersebut mengalami penurunan yang signifikan dengan hasil wawancara dengan Buk Harismawati:

“ATB pada dinas perhubungan tidak mengalami penurunan nilai yang signifikan, Penghentian dan pelepasan ATB dinas perhubungan ini tidak ada. Dan tidak terjadi penghentian serta pelepasan ATB nya. Dinas perhubungan tanah datar juga tidak memiliki Perubahan-perubahan dan alasan perubahan terhadap periode amortisasi atau metode amortisasi, dan Keberadaan ATB yang dimiliki dinas perhubungan ini karena dinas perhubungan ini memiliki keberadaan ATB sendiri yang artinya tidak ikut campur tangan orang lain. Indikasi penurunan nilai ATB Dinas perhubungan ini tidak memiliki indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan”

Berdasarkan hasil wawancara yang berlangsung pada kantor dinas perhubungan Kabupaten Tanah Datar, bahwa ATB dinas ini tidak mengalami penurunan nilai yang signifikan, dan penghentian dan pelepasan ATB dinas perhubungan ini tidak ada.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar, bahwa Dinas Perhubungan memiliki 1 Software yang digunakan pada aplikasi bernama SIMDA BMD. Aplikasi tersebut hanya bisa digunakan oleh pegawai dinas perhubungan saja tidak dikenakan oleh pihak luar untuk mengaksesnya lebih dalam. Dalam pembahasan diatas bahwa aset tidak berwujud berupa software pada Dinas Perhubungan dengan nama SIMDA BMD Tanah Datar telah sesuai dengan SAP No.14.

KESIMPULAN

Dari Penjelasan Informan yang peneliti wawancara yaitu Harismawati selaku tenaga IT di Dinas Perhubungan tersebut dapat disimpulkan bahwa dari Dinas Perhubungan memiliki satu software yaitu Simda BMD yang mana untuk software ini tidak diperjualbelikan dan software ini hanya dipakai oleh Dinas Perhubungan sampai sekarang, untuk masa manfaat dari software ini 5 tahun serta tidak ada mengalami penurunan nilai yang signifikan. Dinas perhubungan ini juga tidak mengalami nilai yang diamortisasikan, yang mana Software nya tidak bisa di akses oleh sembarangan orang untuk mengantisipasi pembobolan data situ pada dinas tersebut. Dinas Perhubungan ini juga tidak memiliki perubahan-perubahan terhadap ATB yang dimiliki oleh dinas perhubungan dan tidak pula di ikut campuri tanggapan dari pihak luar. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai aset tetap, seperti inflasi, perubahan teknologi, dan perubahan regulasi, juga perlu diperhatikan dalam analisis perlakuan akuntansi aset tetap. Dengan melakukan analisis perlakuan akuntansi aset tetap yang benar dan konsisten, dinas-dinas pemerintahan dapat menjaga akuntabilitas publik dan efektivitas pelaporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. 2015. Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan). Jilid 1. Edisi Kelima. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Afrizal. (2015). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Fitriani, N. I., Fitri, S. A., Marlin, K., & Melia, Y. (2022). Analisis Sistem Informasi akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran kas Pada Rsud Sungai Rumbai. *JakSya: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(1), 62–75.
- Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi. Salemba Empat Jakarta.
- Lev, B. (2001). Intangibles: Management, Measurement and Reporting. Washington DC: Brooking Institution Press.
- Mayangsari Putri ,A, dkk, Analisis Penerapan PSAK No.16 Dalam Perlakuan Akuntansi Tetap Perusahaan
- Priyono, Nuwun .2014. Perkembangan Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia Periode Reformasi
- Pahala Nainggolan, Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) h. 121
- Rima A. Lestari., S.S. Pangemanan., H. Sabijono. Penerapan Akuntansi Belanja Rencana Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar 2016-2021

- Sukrisno Agoes, dan Estralita Trisnawati, Akuntansi Perpajakan. (Jakarta:Selemba Empat, Edisi Dua Revisi, 2009) h. 102
- Simanjuntak, Binsar H. 2012. Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia. www.ksap.org
- Satori, D. dan Komariah, A. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Tampanatu Anastasia. 2013. Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Langsung pada SKPD di kota Bitung. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado. Jurnal EMBA ISSN 2303-1174 Vol 1. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/1943/1540>. Akses tgl 7 November 2013. Hal 90-97.
- Wulandari, N., & Hamid, M. (2018). Evaluasi Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL Pada Laporan Keuangan Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2016. Doctoral dissertation, STIE Widya Wiwaha).